

**MASUKNYA PENGUNGSI YAMAN KE KOREA SELATAN PADA  
TAHUN 2018**

**Oleh : Arni Anggraeni**

**Pembimbing: Ahmad Jamaan, S.IP., M.Si**

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

***ABSTRACT***

*Yemen is having a humanitarian crisis due to the conflict caused by Houthi. This humanitarian crisis has caused many Yemeni people to flee to other countries to seek protection. In 2017, South Korea opened direct flights from Kuala Lumpur to Jeju Island. Yemeni refugees who stayed in Malaysia decided to seek protection to Jeju Island because Malaysia has not ratified the 1951 Convention on Status of Refugees. Due to the reason, Yemeni refugees could not stay for long in Malaysia and had to flee to other countries. Meanwhile, South Korea has ratified 1951 Convention on Status of Refugees and can provide protection to refugees. There are 561 Yemeni refugees who entered Jeju Island to seek protection.*

*This research found that the conditions of Yemeni people really need help from other countries that have ratified refugee agreement to help them. However, South Korea was not ready to handle Yemeni Refugees who came in 2018 which caused problems to refugees.*

***Keywords : Jeju Island, Yemeni Refugees, 1951 Convention on Status of Refugees***

## PENDAHULUAN

Peristiwa Kebangkitan Dunia Arab atau dikenal dengan sebutan The Arab Spring merupakan peristiwa kelam dimana jatuhnya rezim pemimpin otoriter di Arab sejak di awal tahun 2011. Dari beberapa negara Timur Tengah yang mengalami dampak dari peristiwa tersebut, Yaman juga mengalami hal yang serupa pada saat Ali Abdullah Saleh memimpin saat itu.

Akibat dari peristiwa Kebangkitan Dunia Arab di Yaman adalah terjadinya konflik yang diakibatkan oleh dua faktor utama, yaitu penyatuan wilayah Yaman sejak 1990 dan masyarakat yang protes karena pemerintah yang sangat korup serta melakukan tindakan penindasan.<sup>2</sup> Hal ini menyebabkan muncul suatu kelompok minoritas yang menentang pemerintah yang korup dan berusaha untuk membangun kembali tatanan politik Yaman, yang dinamakan dengan Kelompok Houthi.

Untuk mengekspresikan penolakan tersebut, kelompok Yaman banyak melakukan demonstrasi hingga mengambil alih ibu kota Yaman, yaitu Sana'a pada tahun 2014. Salah satu negara tetangga Yaman, yaitu Arab Saudi menganggap bahwa kelompok Houthi sangat berbahaya dan menjadi ancaman ideologi. Selain itu, demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok Houthi telah melewati perbatasan Arab Saudi sehingga menjadi imbas dari demonstrasi tersebut. Hal ini kemudian mendorong Arab Saudi untuk membentuk aliansi bersama tujuh negara untuk mengintervensi konflik

yang diakibatkan oleh kelompok Houthi di Yaman.

Amerika Serikat juga melihat kelompok Houthi sebagai sebuah ancaman dan mengancam perdamaian dunia sehingga Amerika Serikat bekerjasama dengan Arab Saudi untuk menjatuhkan kelompok Houthi. Pada akhirnya, Amerika Serikat juga ikut bergabung dalam aliansi Arab Saudi. Dalam upaya untuk dapat mengakhiri konflik yang terjadi di Yaman, Arab Saudi beserta Amerika Serikat dan aliansi lainnya melakukan intervensi militer. Namun akibat dari intervensi tersebut menimbulkan krisis kemanusiaan terbesar di dunia.

Intervensi yang dilakukan merusak fasilitas kesehatan, rumah-rumah, serta orang-orang yang menjadi korban terluka, meninggal hingga krisis pangan dan kesehatan yang juga terjadi. Akibatnya, banyak orang Yaman yang melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan.

Dari beberapa negara yang menjadi tujuan, Malaysia menjadi salah satu tempat singgah para pengungsi Yaman untuk mendapatkan perlindungan. Namun mereka tidak bisa bertahan lama disana karena Malaysia yang tidak memiliki peraturan dan kewajiban untuk memberikan status pengungsi dan mengharuskan para pengungsi Yaman untuk keluar dari Malaysia setelah 3 bulan perpanjangan visa.

Pada saat yang bersamaan, di tahun 2018 Korea Selatan membuka penerbangan langsung dari Pulau Jeju ke Kuala Lumpur. Pulau Jeju menjadi daya tarik karena wisatawan

asing dapat mengunjungi Pulau Jeju tanpa visa dan menetap selama 30 hari.

Hal ini menjadi daya tarik pula bagi pengungsi Yaman di Malaysia untuk masuk ke Pulau Jeju. Selain itu, Korea Selatan merupakan negara yang telah meratifikasi konvensi 1951 terkait pengungsi sehingga dapat memberikan status pengungsi dan perlindungan kepada orang Yaman. Sehingga pada 2018, terdapat 561 pengungsi Yaman yang masuk ke Pulau Jeju dan menetap disana.

Tulisan ini akan menjelaskan tentang masuknya pengungsi Yaman ke Pulau Jeju dan kehidupannya disana.

## **PEMBAHASAN**

### **Sejarah Konflik Yaman**

Pada tahun 2008 hingga 2009, negara-negara Arab dihadapkan dengan peristiwa *Arab Spring* atau Kebangkitan Dunia Arab yang merupakan gerakan revolusi bertujuan untuk mengubah tatanan menuju masyarakat serta bangsa ideal setelah sekian lama dipimpin dengan sistem otoriter, kekuasaan yang tidak dibatasi dan juga mengekang kebebasan masyarakat serta kesenjangan masyarakat yang begitu jauh. Gerakan ini juga menjadi awal mula gerakan demokrasi di negara-negara Arab.

Tidak hanya itu saja, protes yang dilakukan tersebut membuat kondisi ekonomi Yaman semakin memburuk. Laporan dari *Central Intelligence Agency* (CIA) menunjukkan bahwa akibat protes di Yaman pada tahun 2011, *General Domestic Product* (GDP) Yaman menjadi turun ke 11% serta diiringi dengan permasalahan lainnya, seperti

sulitnya untuk mengakses air, angka pengangguran yang tinggi hingga 27% dan masalah kelaparan. Dibandingkan Arab Saudi sebagai negara tetangga, pendapatan per kapita Yaman hanya \$3,400 atau 16 kali lipat lebih rendah. Kondisi ekonomi yang buruk ini menyebabkan protes di Yaman semakin berlanjut.

Dalam masa transisi yang diasiasi oleh *Gulf Cooperation Council* (GCC) pada 24 Februari 2015, Presiden Ali Abdullah Shaleh akhirnya turun dari jabatan akibat ketidakmampuannya dalam menyelesaikan protes yang terjadi. Kepemimpinan Presiden Ali Abdullah Shaleh kemudian digantikan oleh Abd-Rabbu Mansour Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden Shaleh. Meskipun Hadi telah mengambil alih kepemimpinan di Yaman, jabatannya sebagai Presiden tetap mendapatkan protes dari kelompok Houthi serta kelompok lainnya, yaitu *Al Qaeda in Arab Peninsula* (AQAP).

Kelompok ini merupakan kelompok teroris yang banyak melakukan terror di Yaman. Selain itu, Hadi dianggap merupakan antek Amerika Serikat sehingga banyak yang menentang terpilihnya Hadi sebagai Presiden Yaman. Hadi juga dianggap menutup kesalahan Shaleh selama dia menjabat sehingga Shaleh tidak sempat diadili atas tindakan yang dilakukannya.

Masa kepemimpinan Hadi dihadapkan oleh permasalahan lainnya ketika kelompok Houthi menyadari bahwa transformasi pemerintahan yang dilakukan ini hanyalah bersifat formalitas saja.

Meskipun telah terjadi transisi kepemimpinan dari Shaleh ke Hadi,

kondisi Yaman masih belum stabil akibat pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok Houthi serta dengan kemunculannya AQAD di Yaman. Presiden Hadi pun mengalami kesulitan untuk melaksanakan tugasnya sebagai presiden serta menciptakan perdamaian di Yaman. Melihat ketidakmampuan presiden Hadi, hal ini dimanfaatkan oleh Kelompok Houthi untuk merebut kekuasaan pemerintahan Hadi pada saat itu.

Dengan bantuan dari Iran berupa senjata maupun pembiayaan lainnya, kelompok Houthi berhasil mengambil alih Sana'a pada September 2014.<sup>6</sup> Kelompok Houthi telah memegang kekuasaan penuh di Sana'a dan sering melakukan intervensi terhadap pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, terutama yang berhubungan dengan konstitusi dan distribusi kekuasaan.

Bentuk intervensi yang dilakukan oleh kelompok Houthi salah satunya adalah dengan memaksa Presiden Abd Rabbu Mansur Hadi untuk menandatangani perjanjian *Peace and National Partnership* pada September 2014. Perjanjian tersebut berisi tentang pembentukan pemerintahan Yaman yang baru dalam jangka waktu satu bulan dengan menyertakan kelompok Houthi di dalam struktur pemerintahan yang baru tersebut. Meskipun kelompok Houthi berhasil memaksa Hadi untuk menandatangani perjanjian tersebut, kelompok Houthi tetap merasa tidak puas dengan realisasi dari perjanjian tersebut. Hadi yang dipaksa oleh kelompok Houthi dalam menandatangani perjanjian serta bagaimana Houthi bisa mengambil

kendali Hadi menunjukkan betapa lemahnya pemerintahan Yaman pada saat itu. Hal ini menimbulkan keraguan oleh banyak masyarakat Yaman sendiri atas kredibilitas kepemimpinan Hadi.

Hadi mengetahui bahwa dirinya menjadi target dari operasi tersebut melarikan diri ke Arab Saudi untuk mendapatkan bantuan. Dia meminta bantuan Arab Saudi agar pemberontakan yang dilakukan oleh Houth di hentikan. Arab Saudi akhirnya mengabulkan permintaan Hadi dan membentuk suatu koalisi penyerangan terhadap kelompok Houthi pada 26 Maret 2015 yang dinamai *Operation Decivise Storm*.<sup>7</sup> Dalam koalisi tersebut, akan ada 10 negara yang bergabung untuk melakukan penyerangan demi melindungi dan membela pemerintah yang sah, yaitu Presiden Abd Rabu Mansur Hadi.

Amerika Serikat sebagai sekutu Arab Saudi memberikan bantuan dengan menyediakan informasi intelijen yang. Berhubungan dengan kelompok pemberontak Houthi di Yaman Terbentuknya koalisi ini diharapkan dapat menghentikan konflik di Yaman dan tidak memperburuk kondisi keamanan di Timur Tengah. Namun intervensi militer yang dilakukan oleh Arab Saudi dan koalisi ini tidak didukung oleh PBB, Tiongkok hingga Oman yang merupakan anggota GCC. Pihak ini menganggap bahwa konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara politis dan bukan melalui intervensi militer yang akan membahayakan banyak masyarakat.

Intervensi militer yang dilakukan semakin tidak dapat dikendalikan. Hal ini dikarenakan Houthi yang mulai menyerang warga

sipil dan koalisi mulai menggunakan senjata yang dilarang, yaitu berupa munisi tandan. Tindakan ini kemudian dikecam oleh masyarakat internasional dikarenakan membahayakan nyawa masyarakat Yaman dan masyarakat sipil lainnya.

Konflik antara Houthi dan koalisi tidak dapat dihentikan. Tahun 2016 merupakan tahun dimana kondisi Yaman semakin parah dengan meningkatnya serangan dari Houthi dan koalisi. Serangan yang dilakukan oleh koalisi sebanyak 3 kali pada bulan Maret, Agustus, dan Oktober menewaskan 206 warga sipil serta 500 orang yang terluka. Pada tahun 2016, isu kemanusiaan di Yaman semakin mendapatkan perhatian internasional akibat dampak buruk dari serangan militer.

### **Kondisi Pengungsi Yaman**

Berdasarkan laporan dari Koordinator Badan Kemanusiaan PBB untuk Yaman, Jamie McGoldrick, bahwa diperkirakan lebih dari 10.000 orang tewas dan hampir 40.000 orang yang mengalami luka-luka. Berdasarkan laporan dari UNOCHA per Desember 2017, dari total populasi masyarakat Yaman sebanyak 29,3 juta, terdapat 22,2 juta orang yang membutuhkan bantuan; 11,3 juta orang tergolong *Acute Need* atau yang harus segera mendapatkan bantuan secepatnya agar bisa selamat dan tetap mempertahankan kehidupannya, serta 10,9 juta orang tergolong *Moderator Need* yang membutuhkan bantuan untuk menstabilkan keadaan mereka dan agar tidak jatuh ke *acute need*.

Akibat konflik yang terjadi di Yaman ini pun membawa beberapa dampak terhadap masyarakat dari berbagai bidang, seperti krisis

pangan, kesehatan, kemiskinan, pengungsi. Untuk dari segi pangan sendiri, Yaman sekarang adalah negara dengan krisis keamanan pangan yang diakibatkan manusia terbesar di dunia. Di Yaman ada 17,8 juta orang yang sekarang mengalami rawan pangan. dimana dari jumlah tersebut, 8,4 juta orangnya sangat rawan pangan dan berisiko kelapara. Bahan pangan merupakan sumber yang paling penting dalam kehidupan namun angka krisis pangan ini dapat menyebabkan resiko kematian yang tinggi dan membahayakan situasi krisis kemanusiaan di Yaman.

Kemudian dari segi kesehatan, hanya 50 persen fasilitas kesehatan yang berfungsi penuh namun banyak petugas kesehatan yang tidak terbayarkan gajinya. Dari 16,4 juta pengungsi Yaman yang membutuhkan bantuan agar mendapatkan akses memadai ke fasilitas kesehatan, 9,3 juta orang diantaranya sangat membutuhkan bantuan kesehatan.

Akibat kurangnya akses fasilitas kesehatan, penyakit yang menyebar serta kondisi yang sangat tidak stabil di Yaman akibat konflik yang terjadi menyebabkan banyak orang yang kehilangan tempat tinggal dan harus melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan.

### **Pengungsi Yaman di Pulau jeju**

Konflik di Yaman menyebabkan banyak masyarakat Yaman harus melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan. Yaman mencari negara-negara tujuan yang dapat dengan mudah untuk dimasuki, seperti Djibouti, Malaysia dan Ekuador yang memiliki prosedur mudah untuk dapat menetap. Namun Malaysia menjadi satu-satu negara

dengan kebijakan tanpa visa jika ingin berkunjung. Dikarenakan Malaysia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan memiliki ketakutan untuk membuka hukum imigrasi dalam menerima pendatang dari Yaman terus menerus.

Pada saat itu, penerbangan Air Asia dari Kuala Lumpur ke Pulau Jeju membuka rute langsung untuk tujuan turisme. Di sinilah Jeju dianggap menjadi 'surga' untuk pengungsi Yaman agar bisa berlindung dikarenakan untuk memasuki Pulau Jeju tidak memerlukan visa (bebas visa). Kebijakan Bebas Visa ini diciptakan dengan tujuan meningkatkan angka turisme di Pulau Jeju serta meningkatkan perekonomian Pulau Jeju. Namun nyatanya, kebijakan bebas visa ini mengundang kedatangan secara mendadak pengungsi dari Yaman dalam jumlah yang banyak serta dalam waktu yang singkat.

Hal ini menyebabkan kepanikan untuk pemerintahan pulau Jeju. Ditambah lagi dengan fakta bahwa mereka datang sebagai turis namun memiliki tujuan lain yaitu untuk mengajukan status sebagai pengungsi.

## KESIMPULAN

Konflik di Yaman menyebabkan krisis kemanusiaan terbesar didunia. Hal ini mendorong masyarakat Yaman untuk mengungsi ke negara lain untuk mendapatkan perlindungan. Dari beberapa negara yang menjadi tujuan pengungsi Yaman, Pulau Jeju yang ada di

Korea Selatan menjadi daya tarik untuk mendapatkan perlindungan. Karena Korea Selatan telah meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan pengungsi kepada orang Yaman yang masuk. Selain itu, pemerintah Korea Selatan tidak siap untuk menerima jumlah pengungsi Yaman yang masuk secara tiba-tiba dan secara bersamaan. Disini Korea Selatan harus menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi tentang Pengungsi dan memberikan perlindungan kepada pengungsi Yaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC Indonesia. *Konflik Yaman: Korban tewas lampau 10.000 jiwa, kata PBB*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-38646990> pada 20 Oktober 2022
- Fuadi, Ahmad. 2017. "Kepentingan Arab Saudi Menghentikan Gerakan Pemberontak Houthi". *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*. Vol. 15 No.1, hal: 1-84
- Maulana, Muhamad Syahdy. *Persaingan Kekuatan Sudi Arabia (Sunni) dan Iran (Syiah) pada Kasus Konflik Kontemporer (Suriah dan Yaman)*. *Jurnal Gama Societa*, Vol. 2 No. 2, hal.101-110
- OCHA. *Yemen: 2018 Humanitarian Needs Overview*. Diakses dari <https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-2018-humanitarian->

needs-overview-enar pada 22  
Oktober 2022

Putera, Irvaldi Ananda. "Latar  
Belakang Operation Decisive Storm  
Arab Saudi terhadap Yaman

Tahun 2015". Diakses dari

[https://repository.unair.ac.id/75413/4/JURNAL\\_Fis.HI.44%2018%20Put%20l.pdf](https://repository.unair.ac.id/75413/4/JURNAL_Fis.HI.44%2018%20Put%20l.pdf)

Sahide, Ahmad. 2015. The Arab  
Spring: Membaca Kronologi  
dan Faktor Penyebabnya.  
*Jurnal Hubungan  
Internasional* Vol.4 No.2, hal.  
118-129

Sahide, Ahmad. 2022.  
"Demokratisasi Era The  
Arab Spring di Negara-  
Negara Arab". *Artikel  
Ideologi*. Diakses dari  
<https://ktt.fib.ugm.ac.id/2022/06/15/demokratisasi-era-the-arab-spring-di-negara-negara-arab/>

Yadav, Stacey Philbrick. 2015. The  
"Yemen Model" as a Failure of  
Political Imagination.  
*International Journal Middle  
East Studies* Vol.47 No.1,  
hal.144-147